

Pengaruh Implementasi Kebijakan Camat Terhadap Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dengan Lembaga Eksternal Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja Pemerintah Kecamatan Pakenjeng

Indra Ginanjar¹, Aceng Ulumudin², Ikeu Kania³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

¹24091121019@pasca.uniga.ac.id

²Aceng.ulumudin@uniga.ac.id

³ikeukania@uniga.ac.id

Abstrak

Mekanisme penelitian ini menggunakan metode survai analitik deskriptif, prosedur pemilihan ukuran berlandaskan pada skala semantik diferensial dengan lima strata dalam pengukuran ordinal. Verifikasi validitas dan reliabilitas peralatan penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi Pearson Product Moment dan sampel 33 responden memakai teknik sampling. Akuisisi data dilakukan menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan perhitungan statistik berbasis analisis jalur (Path Analysis) serta data berskala ordinal dikonversi menjadi data interval melalui metode suksesif interval (Method Of Successive Interval). Berdasarkan hasil evaluasi, eksekusi kebijakan kepala daerah kecamatan menunjukkan pada standar baik, koordinasi pemerintah kecamatan dikategorikan baik dan efisiensi keberhasilan program kerja lembaga pemerintah menunjukkan pada standar baik. Hasil dari verifikasi hipotesis penelitian ini merumuskan bahwa eksekusi kebijakan kepala daerah kecamatan dengan cara kolektif mempengaruhi secara signifikan daya kerja koordinatif pemerintah kecamatan dan efisiensi keberhasilan program kerja lembaga pemerintah. Hal ini didemonstrasikan oleh nilai Determinasi Koefisien yang menunjukkan bahwa dampak eksekusi kebijakan kepala daerah kecamatan terhadap daya kerja koordinatif pemerintah kecamatan dan efisiensi keberhasilan program kerja lembaga pemerintah di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut cukup signifikan. Dan hubungan antara variabel secara parsial menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Koordinasi.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merombak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Administrasi Daerah, membentuk Kecamatan dalam perbatasan kabupaten/kota melalui Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP). Seorang Camat dipilih untuk mengendalikan Kecamatan dan dalam pelaksanaan tugasnya, Camat memperoleh delegasi sebagian dari kuasa Bupati/Walikota untuk mengadministrasi sebagian dari urusan otonomi lokal. Di samping penggunaan tugas tersebut, Camat juga menangani tugas-tugas pemerintah umum mencakup pengawasan, koordinasi dan residu wewenang.

Pada dasarnya, pentingnya delegasi kuasa dari Bupati adalah krusial dalam mendorong akselerasi pengembangan, khususnya memperhatikan luasnya wilayah Kabupaten/Kota. Teknik pembatasan luas wilayah secara implisit akan mengurangi rentang atau jarak pelayanan publik. Perumusan kebijakan memainkan peran kunci di dalam menentukan efektivitas implementasi kuasa dari setiap tingkat pemerintahan sesuai dengan struktur dan fungsi yang dimiliki. Wasistiono (2009: 48) menegaskan bahwa kuasa yang dikerjakan oleh Camat, dapat dibinjai menjadi kuasa atributif dan kuasa delegatif.

Pemerintah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah. Perubahan regulasi dari waktu ke waktu belum mencerminkan adanya "*political will*" dari pemerintah untuk memberikan kekuasaan atau kewenangan agar pemerintahan kecamatan secara kelembagaan dapat mengatur dan mengelola sebagian kewenangan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan ini tergambar pada setiap regulasi yang dibuat dan dampaknya terhadap implementasi kewenangan Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten yang mengepalai wilayah Kecamatan.

Fenomena kelembagaan Pemerintahan Kecamatan, dengan tugas Camat "melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah", pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Menurut Mc. Farland (Handyaningrat, 1985:89) Koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Wasistiono (2009: 48) mengatakan bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat, dapat dibedakan antara kewenangan atributif dan kewenangan delegatif.

Di Kecamatan Pakenjeng untuk mengoptimalkan Program Pembangunan maka camat mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran No. 005/124-Kec/2022 tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bulanan semua lembaga Pemerintahan yang ada di Kecamatan Pakenjeng. Dengan harapan Rapat Koordinasi tersebut menjadi media silaturahmi Pemerintah Kecamatan dengan Lembaga Eksternal yang ada di wilayah Kecamatan Pakenjeng, penyampaian informasi Pemerintahan, informasi pembangunan dan monitoring pelaksanaan pembangunan serta diharapkan semua instansi dapat mengikutinya dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Hasil yang didapat peserta dapat diinformasikan kembali kepada masyarakat yang ada di wilayahnya maupun kepada pegawai di lembaga yang dipimpinnya, sehingga tujuan dari pembangunan dapat tercapai dengan cepat dan tepat. Melihat dari hasil laporan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah kecamatan dengan Lembaga Pemerintahan Tingkat Kecamatan pada hari senin tanggal 2 Mei 2022 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pakenjeng dengan peserta sebanyak 25 orang.

Narasumber dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: Camat Kecamatan Pakenjeng, Sekmat Kecamatan Pakenjeng. Pada kesempatan tersebut camat menjelaskan tentang arti pentingnya koordinasi di Tingkat Kecamatan sebagai sarana komunikasi, silaturahmi, penyampaian informasi pemerintah di Tingkat Kecamatan sehingga dipandang perlu semua instansi terkait bisa memahaminya.

Walaupun dalam realisasinya pelaksanaan koordinasi di Tingkat Kecamatan Pakenjeng belum

maksimal dilaksanakan dengan berbagai hal yang menjadi penyebabnya. Pada kegiatan tersebut diadakan diskusi dengan dua sesi pertanyaan dan pernyataan dari peserta yang hadir dalam kegiatan. Pertama Setiawan dari APDESI dengan pertanyaan tentang perlunya penekanan pelaksanaan kebijakan koordinasi yang efektif dan menyeluruh di Tingkat Kecamatan. Menurut data di Kantor Kecamatan Pakenjeng, pemicu permasalahan tersebut karena lembaga Pemerintahan belum memahami tentang arti dan tujuan dari pentingnya koordinasi tersebut, sehingga efektivitas pencapaian program kerja pemerintah belum maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian awal terdapat fenomena masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan terhadap koordinasi pemerintah kecamatan dengan Lembaga Eksternal belum dilaksanakan secara optimal, yang diantaranya komunikasi belum efektif, dan kurang tegasnya Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja pemerintah kecamatan. Data dapat dilihat pada Tabel 1 Angka kehadiran peserta Rapat Koordinasi yang hadir menurun.
- b. Manajemen pelaksanaan koordinasi yang belum optimal yang diantaranya adalah belum adanya perencanaan yang baik dalam pelaksanaan koordinasi Tingkat Kecamatan.
- c. Partisipasi peserta Rapat Koordinasi masih rendah, sehingga dipandang perlu penekanan dari Camat tentang pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan melalui kegiatan rapat koordinasi dengan UPTD dan lembaga Pemerintahan yang ada di Tingkat Kecamatan lemahnya koordinasi dengan Lembaga Pemerintahan Tingkat Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi bulanan tidak maksimal.
- d. Efektivitas pencapaian program koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Lembaga eksternal Tingkat Kecamatan masih belum efektif hal dapat dilihat dari partisipasi peserta yang kurang baik, lemahnya motivasi lembaga serta banyaknya ormas yang tidak produktif. Hal ini dapat dilihat masih adanya lembaga pemerintahan yang merasa kegiatan dua arah yang dilakukan oleh Kecamatan masih kurang dan belum tersampaikan dengan baik.

Dalam penelitian ini, beragam konsep digunakan sebagai landasan teoritis. Utamanya, argumen yang dituangkan oleh Edwards (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2012: 177) yang menilai pelaksanaan kebijakan publik sebagai suatu proses yang melibatkan elemen komunikasi dengan jelasnya dan tingkat presisi kebijakan serta tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan. Elemen lain tersebut melibatkan juga sumber daya, yang berarti, sumber daya manusia dan sumber daya material lainnya. Ditambah lagi dengan tingkah laku aparat birokrasi, yakni tingkat kesepakatan di antara pelaku kebijakan dan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan tersebut. Struktur birokrasi juga memiliki peran penting, terutama dalam hal penerapan prosedur dan sikap yang rutin, serta penanganan fragmentasi tanggung jawab di antara berbagai unit di dalam organisasi.

Konsep lain yang dipertimbangkan dalam penelitian ini ada pada pandangan Terry yang dikutip dalam Handoko (2016:43) bahwa proses koordinasi membutuhkan empat syarat, yang meliputi: keinginan untuk bekerja sama, semangat persaingan antar-departemen, semangat kerja tim, dan loyalitas antar anggota tim.

Terakhir, penekanan pada efektivitas organisasi juga sangat penting, dengan merujuk pada teori yang diusulkan oleh Etzioni (sebagaimana dikutip oleh Indrawijaya, 2010:227). Menurut teori ini, ada empat kriteria dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu adaptasi, integrasi, motivasi anggota, dan produksi.

2. Metodologi

Metodologi yang diaplikasikan dalam penelitian ini berjenis inferensial, dengan teknik evaluatif sebagai pendekatannya. Penelitian ini menampilkan konstruksi tiga variabel: satu variabel independen, satu variabel mediator, dan satu variabel dependen, yang interaksinya berlandaskan prinsip sebab-akibat. Target demografis atau populasi penelitian ini mencakup 33 responden yang akan dijadikan subjek dalam studi ini. Terkait penggalan data, dilakukan melalui dua saluran: studi literatur dan studi empiris, yang melibatkan rangkaian praktik seperti: Observasi, Wawancara, dan Penyebaran Kuesioner. Pendiagnosaan instrumen penelitian melibatkan prosedur verifikasi keabsahan dan konsistensi, sementara teknik pengolahan data menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Statistik.

3. Hasil dan Pembahasan

Mengacu pada temuan penelitian mengenai dampak realisasi kebijakan aplikasi administrasi personalia terhadap performa petugas administrasi personalia dalam pencapaian efisiensi data personalia di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, berikut ini adalah ringkasan kesimpulan yang dapat ditawarkan:

a. Variabel Implementasi Kebijakan Camat Di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut

Melihat data yang berhubungan dengan koordinasi administrasi wilayah Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, kita bisa mendapatkan skor rata-rata pendapat responden adalah 79.49%, yang masuk dalam kriteria 'baik' dengan nilai skala 3.9747. Ini berarti bahwa koordinasi pemerintah kecamatan di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut dinilai positif.

Data selanjutnya menunjukkan bahwa indikator skoring tertinggi dari variabel koordinasi administrasi wilayah di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut adalah indikator Kesadaran mengenai pelaksanaan koordinasi, dengan persentase 84.24% dan kriteria 'sangat baik' serta nilai skala 4.2121. Itu menunjukkan bahwa tingkat koordinasi di lingkup pemerintahan kecamatan tersebut sudah sangat baik.

Namun, indikator terendah dalam variabel koordinasi pemerintah kecamatan tersebut adalah indikator tentang frekuensi pelaksanaan koordinasi, dengan persentase 75.76%, kriteria 'baik', dan nilai skala 3.7879. Ini berimplikasi bahwa efektivitas pencapaian program kerja institusi pemerintah di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut cenderung dipengaruhi oleh koordinasi pemerintah di level kecamatan tersebut.

b. Variabel Koordinasi Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut

Berdasarkan data yang berfokus pada koordinasi administrasi Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, terlihat bahwa skor rata-rata respon publik adalah 79.49%. Mengacu pada nilai skala 3.9747, situasi ini bisa diklasifikasikan sebagai 'baik'. Menunjukkan bahwa tingkat koordinasi pemerintahan kecamatan di wilayah Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut sudah mencapai level yang memuaskan.

Lebih lanjut, indikator paling unggul yang tercatat dalam variabel koordinasi pemerintahan kecamatan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut adalah Kesadaran pelaksanaan koordinasi, dengan hasil persentase sebesar 84.24%. Menggunakan skala nilainya, 4.2121, situasi ini tergambarkan sebagai 'sangat baik'. Hal ini menandakan bahwa koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan di wilayah tersebut telah mencapai tingkat yang sangat baik.

Namun, indikator yang paling rendah pada variabel yang sama adalah Frekuensi pelaksanaan koordinasi, dengan presentase 75.76% dan kriteria 'baik' menurut skala penilaian 3.7879. Hal ini menandakan bahwa efektivitas dari pencapaian program-program kerja instansi pemerintahan di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, sejauh ini, terpengaruh oleh koordinasi pemerintahan kecamatan di wilayah yang sama.

c. Efektivitas Pencapaian Program Kerja Lembaga Pemerintah di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut

Mengacu pada data yang terkait dengan efektivitas pencapaian program kerja instansi pemerintah di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, ditemukan bahwa skor rata-rata respons responden sebesar 74.55%. Berdasarkan kriteria 'baik' dan nilai skala 3.7273, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program kerja instansi pemerintahan di wilayah tersebut sudah mencapai tingkat keberhasilan yang baik.

Selanjutnya, data tersebut menunjukkan bahwa indikator tertinggi dari variabel efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintahan di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana, dengan persentase sebesar 81.82% dan bernilai 'sangat baik' dengan skala nilai 4.0909. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah di wilayah Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut telah mencapai tingkat yang sangat baik.

Dalam variabel efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, indikator terendah adalah Pengembangan konsensus dengan persentase 65.45%. Hal ini menggambarkan bahwa efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah di wilayah tersebut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh camat di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis utama yang diusulkan adalah: implementasi kebijakan camat mempengaruhi koordinasi pemerintahan kecamatan dengan lembaga eksternal serta efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Hal ini dapat dilihat dari Koefisien Determinasi yang menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan camat terhadap koordinasi pemerintahan kecamatan dengan lembaga eksternal serta efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintahan.

Sub hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara implementasi kebijakan camat dengan pengaruh nyata terhadap koordinasi pemerintahan kecamatan bersama lembaga eksternal. Artinya, koordinasi antara pemerintahan kecamatan dan lembaga eksternal di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang diterapkan oleh camat.

Implementasi kebijakan camat menunjukkan hubungan positif yang signifikan terhadap efektivitas pencapaian program kerja instansi pemerintah di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, menunjukkan dampak yang nyata. Ini mengindikasikan bahwa proses implementasi kebijakan camat menempati posisi penting dalam mempengaruhi tingkat efektivitas pencapaian program kerja instansi pemerintah di lokasi tersebut.

Selain itu, ada hubungan positif signifikan antara koordinasi pemerintahan kecamatan dengan lembaga eksternal dan efektivitas pencapaian program kerja instansi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintahan kecamatan dan lembaga eksternal dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja instansi pemerintahan di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, khususnya ketika didukung oleh implementasi kebijakan camat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bahwa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan camat di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut menunjukan pada kriteria baik.
- b. Koordinasi pemerintah kecamatan dengan lembaga eksternal di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut dikategorikan baik.
- c. Efektivitas pencapaian program kerja lembaga pemerintah di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut menunjukan pada kriteria baik, dengan proporsi tertinggi ada pada indikator peningkatan jumlah saran.

Sedangkan hasil dari pengujian hipotesis utamanya dalam penelitian ini adalah Variabel Implementasi Kebijakan Camat Di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut berpengaruh terhadap Variabel Koordinasi Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut dan Efektivitas Pencapaian Program Kerja Lembaga Pemerintah di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Hal ini diperlihatkan oleh Koefisien Determinasi yang menunjukan bahwa besarnya pengaruhnya.

Daftar Pustaka

- Danim, Sudarwan, (2017). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Edward, G. I. (2017) *Implementing Public Policy*. Washington: CongressionalQuarterly Press.
- Indrawijaya, Drs. Adam I. 2010. *Perilaku Organisasi*. Cetakan kesepuluh. SinarBaru Algensindo, Bandung.
- Hasibuan S.P. Malayu, (2014). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara.

- Iskandar, Jusman, (2017), Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-variabel Sosial dan Psikologi, Bandung: Puspaga.
- Iskandar, Jusman, (2017), Manajemen Publik, Bandung: Puspaga.
- Iskandar, Jusman, (2017), Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Puspaga.
- Iskandar, Jusman, (2017), Teori Sosial, Bandung: Puspaga.
- Iskandar, Jusman dan Putradi, Didit, (2017), Teori Administrasi, Bandung: Puspaga.
- Sedarmayanti. (2017). Manajemen Strategi, Bandung: Refika Aditama,
- Siagian Sondang, (2014), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. (2011). Asas-asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama.
- Sinambela Poltak Lijan, (2008) Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara
- Steers, Richard.M (1985). Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku, Jakarta, Erlangga.
- Sugiono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi 17. Alfabeta, Bandung.
- Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang (1994), Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: Sinar Grafika
- Syafii, Inu Kencana, (2006). Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Thoha, Miftah, (2008) Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta: Kencana
- Thoha, Miftah, (1995) Kepemimpinan Dalam Manajemen, Cet II Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 8.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijaksanaan *Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta: Media Presindo.
- Winardi. (2004). *Asas-asas Manajemen*, Cet III Bandung: Alumni, h. 4
- Winarno, Budi, (2012), Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta: MedPress.
- Ekawati, Maesaroh Siti. 2013. Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Ruang terhadap Kinerja Pegawai Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Guna Mewujudkan Optimalisasi Pengembangan Wilayah dan Efektivitas Konservasi Hutan Lindung di Kabupaten Garut, Tesis, UNIGA, Garut.
- Komalasari, R. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat terhadap Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 22-32.
- Parid, M. T. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Terhadap Kinerja Koordinasi UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja Upt Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 15(2), 90-99.
- Pathuloh, A. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Protokol Kepala Daerah terhadap Koordinasi Keprotokolan dalam Mewujudkan Efektivitas Tugas-tugas Protokol Kepala Daerah. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 33-43.
- Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia Ari Ganjar Herdiansah, Randi Dari (*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016)
- Metter, V., & Horn, V. (1975). *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*. Departement of Political Science Ohio State University Administration and Society, 462 Vol 6 No 4.